

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 27 TAHUN 1996 SERI D NOMOR 16**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 1995
TENTANG
PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN TUNTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

- Menimbang :
- bahwa wilayah pemusatan penduduk yang mawacai tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial, budaya dan ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga memerlukan pengarahannya;
 - bahwa untuk mengarahkan perkembangan kota khususnya kota Kecamatan Tuntang dipandang perlu untuk mengatur dan mengendalikannya dengan menelapkan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Tuntang;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan batas - batas wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
 - Undang - undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);
5. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500),
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN TUNTANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Wilayah Kota adalah suatu wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mewardahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial, budaya dan ekonomi perkotaan;
- e. Kota Kecamatan adalah suatu wilayah sebagaimana tersebut dalam huruf d di atas yang merupakan Ibu Kota Kecamatan, tidak berstatus sebagai Kota Administratif atau Kotamadya ;
- f. Batas wilayah Kota adalah garis batas yang memisahkan antara wilayah kota dan wilayah bukan kota.

BAB II
WILAYAH KOTA
Pasal 2

- (1) Wilayah Kota Kecamatan Tuntang meliputi :
 - a. Desa Tuntang sebagian;
 - b. Desa Lopait sebagian;
 - c. Desa Kesongo sebagian;
- (2) Memberikan Dasar Hukum dan Kepastian Hukum bagi pengaturan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Tuntang.

BAB III
LUAS WILAYAH
Pasal 3

- Luas Wilayah Kota Kecamatan Tuntang 390,39 ha, yang meliputi :
- a. Desa Tuntang sebagian seluas 194,10 ha.
 - b. Desa Lopait sebagian seluas 141,03 ha.
 - c. Desa Kesongo sebagian seluas 55,26 ha.

BAB IV
BATAS WILAYAH KOTA
Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Kota Kecamatan Tuntang adalah :
 - a. Sebelah Utara : Sungai Tuntang, Perkebunan Tlogo dan Jalan Kabupaten (Tuntang - Bringin)
 - b. Sebelah Timur : Perkebunan Tlogo, Jalan Dusun Lopait, Dusun Jeblosan, Perkebunan PT Sri Sarwo Adhi dan Dusun Ngroto
 - c. Sebelah Selatan : Jalan Dusun Ngroto, Dusun Ngreco dan Kesongo Lor
 - d. Sebelah Barat : Rowo Pening
- (2) Untuk mempertegas Batas Wilayah Kota dimaksud ayat (1) Pasal ini dilapangan perlu dibuat Papan Nama Kota pada Batas Wilayah Kota di Jalan - jalan Utama masuk kota.

Pasal 5

Batas Wilayah Kota Kecamatan Tuntang sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini secara rinci terdapat dalam Buku Penetapan batas Wilayah Kota dan Peta skala 1 : 20.000 yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di U n g a r a n
pada tanggal 23 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

Ketua,
cap ttd

Drs. SOEPONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

cap ttd

Drs. SOEDIJATNO

Disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Nopember 1996 Nomor 188 - 3 / 376 / 1996

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tanggal 9 Desember 1996 Nomor 27 Seri D No. 16.

Sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Wilayah / Daerah.

cap ttd.

Drs. WOERYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 051 872

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 1995
TENTANG
PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA KECAMATAN TUNTANG

I. PENJELASAN UMUM :

Perkembangan kota - kota, khususnya kota - kota kecil, semakin meningkat seiring dengan derap langkah kegiatan Pembangunan Nasional. Perkembangan kota - kota yang semakin meningkat tersebut memerlukan pengarahannya dalam perkembangannya. Pengarahan terhadap perkembangan kota yang semakin meningkat di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dilaksanakan dengan mengatur dan mengendalikannya, yaitu dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan.

Penetapan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Tuntang disusun untuk memperoleh struktur data yang jelas dan benar untuk dijadikan pedoman bagi Instansi Pemerintah dan masyarakat dalam mengatur, mengendalikan dan mengarahkan perkembangan fisik kota Ibukota Kecamatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 19 TAHUN 1995

**PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA IBUKOTA
KECAMATAN TUNTANG**

KATA PENGANTAR

Perkembangan kota-kota, khususnya kota-kota kecil semakin meningkat seiring dengan derap langkah kegiatan pembangunan Nasional. Perkembangan kota-kota yang semakin meningkat tersebut memerlukan pengarahannya dalam perkembangannya. Pengarahannya terhadap perkembangan kota yang semakin meningkat dilaksanakan dengan mengatur dan mengendalikannya yaitu dengan menetapkan batas wilayah kota yang tidak berstatus sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II, Kotamadya maupun Kota Administratif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia, di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang telah dilaksanakan penetapan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan di 5 (lima) Wilayah Kecamatan, yaitu Ibukota Kecamatan Klepu, Ambarawa, Bringin, Suruh dan Tuntang.

Penetapan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Klepu, Ambarawa, Bringin, Suruh dan Tuntang tersebut merupakan pedoman bagi instansi Pemerintah dan Masyarakat dalam mengatur, mengendalikan dan mengarahkan perkembangan fisik kota Ibukota Kecamatan.

Selanjutnya diharapkan agar dokumen penetapan Batas Wilayah Kota Ibukota Kecamatan Klepu, Ambarawa, Bringin, Suruh dan Tuntang tersebut dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ungaran, Maret 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

cap ttd

Drs. SOEDIJATNO

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Tujuan Penelitian Batas Wilayah Kota	1
C. Pendekatan Masalah	2
D. Metode Penelitian	3
E. Metode Analisa	4
BAB II PEMBENTUKAN TIM TEKNIS	5
BAB III KEADAAN UMUM WILAYAH PENGAMATAN	6
A. Penetapan Administrasi Wilayah Pengamatan	7
B. Fakta Fisik	7
C. Pola Penggunaan Tanah	9
1. Wilayah Terbangun	10
2. Wilayah Belum Terbangun	13
D. Jaringan Jalan dan Fasilitas Pelayanan Umum	15
1. Jaringan Jalan	15
2. Fasilitas Pelayanan Umum	15
3. Fasilitas Kota	20
E. Status Tanah	20
F. Fakta Kependudukan	20
1. Jumlah dan Perkembangan Penduduk	20
2. Kepadatan Penduduk	21
3. Komposisi Umur Penduduk	21
4. Mata Pencarian Penduduk	23
BAB IV ANALISA DATA	25
A. Dasar Analisa	25
B. Analisis Kependudukan	26
C. Analisa Kebutuhan Ruang	27
1. Kebutuhan Ruang sampai Tahun 2010	27
2. Arah Perkembangan Fisik dan Ruang	27
3. Wilayah Pengembangan	29
BAB V KESIMPULAN	30
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL	1.	Jumlah Luas Wilayah Kecamatan Tuntang	6
	2.	Luas Wilayah Pengamatan	7
	3.	Luas Wilayah Terbangun dan Belum Terbangun dalam Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan Tuntang	10
	4.	Penggunaan Tanah Wilayah Terbangun Dalam Wilayah Pengamatan Batas Wilayah Kota	11
	5.	Jumlah dan kerapatan Bangunan di Wilayah Pengembangan Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan Tuntang	12
	6.	Penggunaan Tanah Wilayah Terbangun dalam Wilayah Pengamatan Batas Wilayah Kota	14
	7.	Panjang jalan Berdasarkan Status dan Kondisi Tiap Tiap Desa dalam wilayah Pengamatan	15
	8.	Jumlah Sekolah Yang ada dalam Wilayah Pengamatan	17
	9.	Jumlah Fasilitas Kesehatan, Tenaga Medis dan Paramedis di studi Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan Tuntang	18
	10.	Jumlah Tempat Ibadah di Kota Tuntang 1992	19
	11.	Jumlah Pemeluk Agama di Kota Tuntang Tahun 1992	19
	12.	Jumlah dan Perkembangan Penduduk di Wilayah Pengamatan	20
	13.	Kepadatan Kotor Penduduk di Tiap Desa Dalam Wilayah Pengamatan Pada Tahun 1992	21
	14.	Kepadatan Bersih Penduduk di wilayah Pengamatan Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan Tuntang	21
	15.	Jumlah penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Wilayah Pengamatan Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan Tuntang Tahun 1992	22
	16.	Prosentasi Jumlah Penduduk Produktif dan Non Produktif di Kota Tuntang Tahun 1992	23
	17.	Mata Pencarian Penduduk di Wilayah Pengamatan Penetapan Batas Wilayah Kota Tuntang Tahun 1992	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tanggal 29 Nopember 1986 Tentang Penetapan Batas Kota di seluruh Indonesia.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tanggal 1 Desember 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas wilayah Kota di seluruh Indonesia.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 135 / 168 / PUOD tanggal 13 Januari 1987, tentang Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 1986.
4. Buku Petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 September 1987 tentang Petunjuk Pemetsan Batas Wilayah Kota.
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 136/916/1987 tanggal 14 Agustus 1987 tentang Pembentukan Tim Teknis Penetapan Batas Wilayah Kota.

B. TUJUAN PENELITIAN BATAS WILAYAH KOTA

1. Memperoleh struktur data yang jelas guna berbagai keperluan dalam mengendalikan dan mengatur perkembangan fisik kota sehingga selain diperoleh hasil pembangunan yang optimal juga agar sejauh mungkin tidak mengorbankan lahan produktif disekitarnya serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.
2. Memudahkan bagi Instansi Pemerintah atau Lembaga Pemerintah, Badan atau Organisasi non Pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menentukan orientasi ataupun prioritas pengalokasian dana setiap kegiatan pembangunan kota.
3. Untuk mengendalikan dan memberi arah perkembangan fisik kota, khususnya dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang mempunyai motto Sehat, Rapi, Aman, Sejahtera dan Indah (SERASI) serta dapat berfungsi mendukung perkembangan / pertumbuhan daerah - daerah disekitarnya.

C. PENDEKATAN MASALAH

1. Latar Belakang Masalah
 - a. Pertumbuhan dan perkembangan kota - kota di Indonesia pada akhir pelita V pada umumnya telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Perkembangan kota tersebut diakibatkan oleh semakin meningkatnya urbanisasi dan semakin besarnya volume maupun kegiatan pembangunan pada sektor perkotaan.
 - b. Perkembangan pembangunan kota tersebut khususnya kota - kota kecil yang disamping berperan memberikan pelayanan juga berfungsi sebagai pusat pengembangan fisik bagi wilayah sekitarnya, menghadapi permasalahan didalam

mengenali karakteristik dan besaran kotanya serta pengendalian pembangunan fisik yang terdapat dikota tersebut. Terjadinya permasalahan tersebut diatas adalah sebagai akibat tidak terdapatnya batas - batas kota kecil yang jelas dan berdasarkan suatu pengaturan yang bersifat menyeluruh yang dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan kotanya.

- c. Oleh karena itu guna meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan pada kota - kota kecil dipandang perlu untuk mengatur dan mengendalikannya dengan menetapkan Batas Wilayah Kota yang tidak berstatus Kotamadya maupun Kota Administratif.

2. Pendekatan Masalah

- a. Yang dimaksud Kota adalah suatu wilayah Administratif sesuai dengan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah yaitu sebagai tempat pemukiman, pemusatan penduduk dan segala aktivitasnya dimana di dalamnya terdapat fasilitas kota sebagai pendukung aktivitas penduduk. Dengan demikian kota pada hakekatnya adalah keseluruhan dari unsur - unsur bangunan, jalan, sejumlah manusia disuatu tempat tertentu dan saling kait mengkait antara satu dengan yang lain.
Kesatuan dari keseluruhannya antara satu dengan yang lain akhirnya memberikan corak terhadap kehidupan manusia yaitu dalam cara hidup dan sikapnya.
- b. Ditinjau dari aspek fisik wilayah kota mempunyai ciri :
 - 1). Tempat pemukiman penduduk yang merupakan satu kesatuan dengan luas, jumlah bangunan, kepadatan bangunan yang relatif tinggi daripada wilayah sekitarnya.
 - 2). Proporsi bangunan permanen lebih besar ditempat itu daripada wilayah sekitarnya.
 - 3). Mempunyai lebih banyak bangunan, fasilitas sosial, ekonomi (Sekolah, Poliklinik, Pasar, Toko, Kantor Pemerintah) daripada wilayah sekitarnya.
Selanjutnya dalam Penetapan Batas Wilayah Kota ini penetapan Batas Wilayah Kota yang ditetapkan dalam hal ini adalah Kota Ibukota Kecamatan. Pengertian Batas Wilayah Kota adalah Batas yang memisahkan antara wilayah kota dengan wilayah bukan Kota (hinterland).
- c. Adapun permasalahan yang ada sebagai akibat belum adanya Penetapan Batas Wilayah Kotanya antara lain :
 - 1). Pertumbuhan kotanya sendiri serta akibat dari pertumbuhan tersebut
 - 2). Pertumbuhan sosial kota yang kurang seimbang.
 - 3). Problematika transportasi sebagai akibat dari prasarana jalan, terminal, lalu lintas kota yang kurang memadai.
 - 4). Perubahan sosial ekonomi diantaranya.
 - Rendahnya tingkat pendidikan.
 - Rendahnya tingkat perekonomian dsb.
- d. Dari permasalahan - permasalahan yang ada, maka pendekatan permasalahan yang dilakukan adalah bertitik tolak dari dampaknya terhadap tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

- 1). Penentuan Batas Wilayah Kota.
Secara optimal diusahakan seimbang dengan proyeksi besaran pertumbuhan disamping faktor penentu lainnya seperti kondisi fisik daerah.
 - 2). Penentuan masing - masing kegiatan penduduk perlu dipertimbangkan faktor kenyamanan dan perluasan sehingga tidak perlu absolut dari standart yang ada.
 - 3). Penyediaan prasarana yang ada yakni : jaringan jalan, terminal antar pedesaan dan utilitas kota air minum, listrik, telepon. Selain itu perlu dipikirkan tentang penyediaan tempat - tempat parkir lingkungan.
3. Kota - kota yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang adalah :
- a. Ibukota Kabupaten yang merupakan pusat kegiatan penduduk dan pusat pemerintahan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang terletak di Ungaran.
 - b. Tempat kedudukan Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang terdiri dari empat Pembantu Bupati yaitu :
 1. Pembantu Bupati Untuk Wilayah Ungaran berkedudukan di Ungaran
 2. Pembantu Bupati Untuk Wilayah Ambarawa berkedudukan di Ambarawa.
 3. Pembantu Bupati untuk Wilayah Tenganan berkedudukan di Tenganan.
 4. Pembantu Bupati Untuk Wilayah Salatiga berkedudukan di Tuntang.
 - c. Ibukota Kecamatan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang terdiri dari 14 Kecamatan dan 4 Perwakilan Kecamatan yaitu :
 1. Ibukota Kecamatan Ungaran terletak di Ungaran.
 2. Ibukota Kecamatan Klepu terletak di Bergas Lor
 3. Ibukota Kecamatan Bawen terletak di Harjosari
 4. Ibukota Kecamatan Ambarawa terletak di Ambarawa
 5. Ibukota Kecamatan Sumowono terletak di Sumowono
 6. Ibukota Kecamatan Jambu terletak di Jambu
 7. Ibukota Kecamatan Banyubiru terletak di Banyubiru
 8. Ibukota Kecamatan Tuntang terletak di Tuntang.
 9. Ibukota Kecamatan Pabelan terletak di Pabelan.
 10. Ibukota Kecamatan Getasan terletak di Getasan
 11. Ibukota Kecamatan Suruh terletak di Suruh
 12. Ibukota Kecamatan Bringin terletak di Bringin.
 13. Ibukota Kecamatan Susukan terletak di Susukan
 14. Ibukota Kecamatan Tenganan terletak di Tenganan .
 15. Perwakilan Kecamatan Klepu terletak di Pringapus
 16. Perwakilan Kecamatan Ambarawa terletak di Bandungan
 17. Perwakilan Kecamatan Susukan terletak di Kaliwungu
 18. Perwakilan Kecamatan Bringin terletak di Bancak.

D. METODE PENELITIAN

1. Penetapan Wilayah Penelitian
Dalam menentukan Wilayah Penelitian, ditentukan terlebih dahulu Desa setempat kedudukan Pusat Pemerintahan tingkat Kecamatan, selanjutnya desa - desa sekitarnya yang diperkirakan berkembang menjadi daerah Ibukota.

Penentuan Wilayah Perencanaan ini didasarkan beberapa pertimbangan antara lain :

- Topografi Penggunaan Tanah
- Pola Penggunaan Tanah.
- Jumlah dan Kepadatan penduduk
- Penyebaran tempat pening
- Jumlah dan penyebaran fasilitas perkotaan
- Kondisi Bangunan.

2. Pemetaan

Setelah ditetapkan wilayah penelitian, maka seluruh wilayah yang diteliti diadakan pemetaan. Dengan menggunakan dasar Peta Topografi skala 1 : 50.000 diadakan perbaikan melalui Pemetaan langsung, sedangkan Peta yang dihasilkan adalah :

1. Penentuan wilayah Penelitian (dalam Peta ini berisi tempat penting, jaringan jalan, dan Tata air)
 2. Pola Penggunaan Tanah
 3. Kondisi Wilayah Penelitian.
 4. Wilayah terbangun
 5. Arah pengembangan fisik kota
3. Pengumpulan Data Penunjang
- Pengumpulan Data Penunjang melalui penelitian / pengumpulan data di lapangan baik melalui Instansi / Dinas maupun Kecamatan Desa.
- Data penunjang ini meliputi :
- Fasilitas pelayanan umum
 - Fasilitas Kota
 - Status Tanah
 - Kependudukan

E. METODE ANALISA

Dari peta dan Data sosial diadakan tabulasi data serta korelasi peta dan data. Hasil Analisa data dan data sosial ekonomi dapat ditentukan :

1. Arah perkembangan fisik kota.
2. Jumlah penduduk 20 tahun yang akan datang
3. Kebutuhan ruang untuk kegiatan penduduk 20 tahun yang akan datang
4. Rekomendasi Wilayah Kota.

BAB II

PEMBENTUKAN TIM TEHNIS

Dalam rangka penetapan Batas Wilayah Kota Tuntang dibentuk Tim Teknis Penetapan Batas wilayah kota dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 136 / 1908 / 1992 tanggal 16 September 1992.

A. ANGGOTA TIM TEKNIS

Susunan anggota Tim Teknis terdiri dari :

1. Sekretaris Wilayah / Daerah selaku Ketua.
2. Kepala Bagian Pemerintahan Umum selaku anggota.
3. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda selaku anggota.
4. Kepala Seksi Tata Guna Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang selaku anggota.
5. Camat Kepala Wilayah masing - masing Kecamatan yang ditetapkan Batas Wilayah Kotanya selaku anggota.

B. TUGAS TIM TEKNIS

Tugas Tim Teknis tersebut adalah :

1. Melaksanakan penelitian dalam rangka menetapkan Batas Wilayah Kota di Kabupaten Dati II Semarang.
2. Mengkoordinasikan kegiatan Tim secara vertikal dan horisontal dengan instansi vertikal tingkat Kabupaten.
Tim Teknis tersebut bertanggung jawab langsung pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

C. TIM ADMINISTRASI

Selain Tim Teknis juga dibentuk Tim administrasi Penetapan Batas Wilayah Kota dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 136 / 1907 / 1992 tanggal 16 September 1992.

Tugas Tim Administrasi tersebut adalah :

1. Menyiapkan administrasi yang berhubungan kegiatan penetapan Batas Wilayah Kota.
2. Mengumpulkan dan meneliti data pendukung guna pengolahan proses Batas Wilayah Kota.
3. Mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah.

BAB III

KEADAAN UMUM WILAYAH PENGAMATAN

Kecamatan Tuntang terletak di antara Kota Ungaran (Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang) dan Salatiga yang dilalui Negara yang menghubungkan kota - kota tersebut dengan kota - kota lainnya.

Luas wilayah Kecamatan Tuntang 5.624 Ha dan berdasarkan letak ketinggian tempat adalah 480 ,m diatas permukaan laut.

Secara Administratif Batas Wilayah Kecamatan Tuntang adalah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Bawen
- Sebelah Selatan : Kotamadya Salatiga
- Sebelah Barat : Kecamatan Banyubiru
- Sebelah Timur : Kecamatan Pabelan.

Kecamatan Tuntang terdiri dari 16 Desa , 98 Dusun.

Tabel 1 : Jumlah luas wilayah Kecamatan Tuntang Kabupaten Dati II Semarang

NO.	DESA	LUAS (ha)
1.	Tuntang	272
2.	Delik	540
3.	Tlompakan	429
4.	Ngajaran	355
5.	Karanganyar	353
6.	Karangtengah	293
7.	Tlogo	292
8.	Watuagung	507
9.	Sraten	145
10.	Gedangan	288
11.	Kalibeji	259
12.	Rowosari	493
13.	Jombor	119
14.	Candirejo	486
15.	Kesongo	429
16.	Lopait	364
	Jumlah	5.624

Sumber data : Monografi Desa 1992

A. Penetapan Administrasi Wilayah Pengamatan

Berdasarkan pola penggunaan tanah dan keadaan fisik dasar kota, maka sifat urban kota Tuntang meliputi :

1. Desa Tuntang
2. Desa Lopait
3. Desa Kesongo
4. Desa Delik.

Keempat Desa tersebut merupakan wilayah yang diperkirakan menjadi daerah perkembangan kota Tuntang dikemudian hari. Sehubungan dengan hal itu, maka wilayah pengamatan meliputi empat Desa tersebut.

Gambaran umum Desa - desa yang ditetapkan sebagai wilayah pengembangan dapat dilihat pada Peta Dasar Nomor 1.

Secara Geografis wilayah pengamatan ini terletak pada :

110 25 , 40 " 58 " - 110 58 " Bujur Timur

7 14 , 28 " 85 " - 7 17, 50 " 49" Lintang Selatan, untuk lebih jelasnya luas wilayah pengamatan berdasarkan perhitungan Planimeter dapat di lihat pada Tabel 2

Tabel 2 : Luas Wilayah Pengamatan

Desa	L. Wil Pengamatan
Tuntang	350,25
Lopait	431,00
Kesongo	426,00
Delik	531,00
Jumlah	1738,25

Sumber : Perhitungan Planimeter Peta Skala 1 : 20.000

Dari tabel tersebut diatas terlihat dengan jelas bahwa luas wilayah pengamatan dan luas desa ada perbedaan. Perbedaan ini disebabkan adanya rawa.

B. Fakta Fisik

1. Letak Geografi

Kota Tuntang merupakan Ibukota Kecamatan Tuntang yang berdasarkan perhitungan Planimeter meliputi wilayah seluas 1738,25 Ha. Wilayah pengamatan mempunyai posisi strategis karena dilalui jalan negara yang menghubungkan Kota Ungaran, Kota Salatiga dan kota - kota lainnya.

Hal tersebut sangat menguntungkan karena dengan dilaluinya jalan tersebut berarti mobilitas penduduk meningkat yang pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan perekonomian sehingga Kota Tuntang dapat berkembang.

Disamping itu juga terdapat obyek wisata Rowopening, dan juga jalan kereta api yang dapat menunjang obyek wisata tersebut.

2. Topografi

Wilayah pengamatan mempunyai Topografi yang bervariasi antara datar, landai sampai bergelombang berada pada ketinggian antara 467 - 718 m di atas permukaan air laut.

a. Pengertian Wilayah Tanah Usaha.

Wilayah Tanah Usaha adalah batasan kegiatan manusia dalam mengusahakan tanah, baik untuk pertanian maupun non pertanian.

Klasifikasi Tanah Usaha adalah :

1. Terbatas 1 ketinggian 0 - 7 m dari permukaan laut.
2. Utama 1 ketinggian 7 - 500 m dari permukaan laut.
 - a. Utama 1a ketinggian 7 - 15 m dari permukaan laut.
 - b. Utama 1b ketinggian 15 - 25 m dari permukaan laut.
 - c. Utama 1c ketinggian 25 - 100 m dari permukaan laut.
 - d. Utama 1d ketinggian 100 - 500 m dari permukaan laut.
3. Utama 2 ketinggian 500 - 1000 m dari permukaan laut.
4. Terbatas 2 ketinggian lebih dari 1000 m dari permukaan laut.

b. Tanah Usaha Wilayah Pengamatan.

Dalam klasifikasi Penggolongan Wilayah Tanah Usaha, Wilayah pengamatan terdapat 2 wilayah yaitu :

- 1). Wilayah Tanah Usaha Utama 1d yang meliputi sebagian besar desa - desa Tuntang, desa Lopait, Desa Kesongo, dan Desa Delik.
Untuk Daerah tersebut permukaannya datar sampai landai dan penggunaan tanah pada wilayah ini berupa sawah, tegalan dan Kebun Campur.
- 2). Wilayah Tanah Usaha Utama 2 yang ada di sebagian kecil Desa Kesongo, Lopait, Tuntang dan Desa Delik.
Pada wilayah ini pada umumnya bergelombang dan penggunaan tanahnya perkebunan.

3. Kualitas Medan

Wilayah pengamatan khususnya Kota Tuntang kecuali Desa Delik terletak di Lembah Perbukitan Gunung Rong, dan hanya sebagian kecil saja yang datar.

Yang diamati dalam kualitas medan ini antara lain kedalaman efektif tanah, tekstur kekasaran) tanah, Drainase dan erosi.

Kedalaman efektif tanah umumnya lebih dari 90 cm tekstur (kekasaran tanahnya) termasuk sedang, drainase baik / tidak pernah tergenang kecuali yang ada ditepi Rowopening. Sedangkan erosinya tidak ada, karena pada wilayah yang berlereng terjal penggunaan tanahnya untuk perkebunan yang dapat berfungsi menjaga tanah dari erosi.

Selain kualitas medan ini juga diamati mengenai lereng. Pada wilayah penelitian lerengnya bervariasi antara lereng datar (0 - 2 %), landai (2 - 8 %), lereng miring (8 - 15 %), lereng miring sekali (15 - 25 %) dan terjal sekali (lebih dari 40 %). Lereng yang terjal sekali hanya terdapat di puncak - puncak bukit yang ada di wilayah Desa kesongo dan Desa lopait.

Pada wilayah penelitian tersebut terdapat 2 jenis tanah yaitu aluvial coklat tua dan latosol coklat tua dan kemerahan, Jenis tanah aluvial coklat tua terdapat disekitar Rowopening dan Sungai Tuntang, sedangkan latosol coklat tua terdapat pada wilayah yang bergelombang dan berbukit.

4. Pola Aliran Sungai

Pada Wilayah pegamatan dapat dijumpai sebuah sungai yang mengalir di sebelah utara Desa Tuntang yaitu sungai Tuntang yang berhulu di Rowopening dan dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air Jelog dan Timo.

Sungai dan saluran air yang ada pada umumnya berfungsi sebagai saluran irigasi, sehingga sawah yang ada di wilayah penelitian rata-rata dapat panen 2 kali dalam setahunnya.

Perlu ditambahkan di sini bahwa sungai yang ada tidak pernah kering, hanya debit airnya yang menurun di musim kemarau.

5. Kesuburan Tanah

Klasifikasi kesuburan tanah untuk Penetapan Batas Wilayah Kota adalah sebagai berikut :

- Daerah Subur : sawah dengan irigasi teknis
- Daerah sedang : Sawah dengan irigasi setengah teknis.
- Daerah kurang subur : sawah tadah hujan, tegalan dan penggunaan tanah lain.

Penggunaan tanah pertanian di wilayah penelitian adalah sawah, tegalan, kebun campur dan perkebunan. Sawah yang ada di wilayah pengamatan berdasarkan klasifikasi Penetapan Batas Wilayah Kota termasuk daerah sedang, karena beririgasi setengah teknis walaupun dapat panen dua kali setahun.

Tegalan yang ada kebanyakan ditanami ketela pohon, jagung, pisang dan ubi. Kebun campur umumnya berada di sekitar pemukiman dan ditanami buah-buahan, kelapa bambu, pisang, dan lain-lain. Sedangkan perkebunan yang ada jenis tanamannya adalah karet, kopi dan cengkeh.

Untuk lebih jelasnya dalam melihat kesuburan tanah atau perkebunan tanah dapat dilihat pada Peta No. 3 Kondisi wilayah penelitian.

C. POLA PENGGUNAAN TANAH

Penggunaan tanah di wilayah pengamatan secara garis besar digolongkan dalam 3 wilayah yaitu :

- Wilayah terbangun seluas 263,75 ha (15,17 %)
- Wilayah belum terbangun seluas 928,50 Ha (53,42 %)
- Penggunaan lain (sungai, rawa dan lain-lain) seluas 546,00 Ha (31,41 %)

Secara terperinci luas wilayah terbangun dan wilayah belum terbangun berdasarkan perhitungan Planimeter untuk masing-masing Desa wilayah pengamatan dapat dilihat pada Tabel Nomor 3 berikut ini :

Tabel 3 : Luas wilayah Terbangun dan belum Terbangun dalam Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan Tuntang.

NO.	DESA	LUAS		WILAYAH TERBANGUN		WIL. BELUM TERBANGUN		PENGUNAAN LAIN - LAIN	
		(HA)	%	(HA)	%	(HA)	%	(HA)	%
1	Tuntang	350,25	100	70,00	19,98	148,50	42,40	131,75	37,6
2	Lopait	431,00	100	70,75	16,42	187,75	43,56	172,50	40,0
3	Kesongo	428,00	100	48,50	11,38	139,25	32,69	238,25	55,9
4	Delik	531,00	100	74,50	14,03	453,00	85,31	3,56	0,6
	Jumlah	1738,25	100	263,75	15,17	928,50	53,42	546,00	31,4

Sumber : Hasil Pengukuran Planimeter

1. Wilayah Terbangun

Wilayah terbangun adalah wilayah yang diatasnya telah didirikan bangunan untuk pemukiman, jasa (Kantor, Sekolah, tempat ibadah, Fasilitas Olah Raga, dan Kesehatan) Perusahaan (Pasar, Toko, Terminal, dan Rumah makan) dan Industri (termasuk bengkel). Secara terperinci luas penggunaan tanah pada wilayah terbangun dapat dilihat pada tabel 4 penggunaan tanah wilayah terbangun untuk jasa sebagian besar terdapat di Desa Tuntang, sedangkan untuk perusahaan di Desa Lopait. Untuk mengatasi lebih jauh mengenai luas penggunaan wilayah terbangun dapat dilihat pada tabel 4 Penggunaan Tanah Wilayah Terbangun, sedangkan penyebarannya dapat dilihat pada Peta No. 2 Pola Penggunaan Tanah terlampir.

TABEL 4 : PENGGUNAAN TANAH WILAYAH TERBANGUN DALAM WILAYAH PENGMATAN BATAS WILAYAH KOTA.

NO.	DESA	LUAS		LUAS WIL. TBN		PEMUKIMAN		JASA		PERUSAHAAN		INDUSTRI	
		(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%
1.	Tuntang	320,25	100	70,00	19,98	66,51	18,99	3,24	0,92	0,25	0,07	-	-
2	Lopait	431,00	100	70,75	16,42	61,68	14,32	2,73	0,63	6,30	1,46	0,04	0,00
3	Kesongo	426,00	100	48,50	11,38	45,74	10,74	2,75	0,64	0,01	0,00	-	-
4	Delik	531,00	100	74,50	14,03	69,10	13,01	5,40	1,02	-	-	-	-
	Jumlah	1723,25	100	263,75	15,17	243,03	13,98	14,12	0,81	6,56	0,38	0,04	0,00

Sumber : Hasil Pengukuran Planimeter

TABEL 5 : JUMLAH DAN KERAPATAN BANGUNAN DI WILAYAH PENGEMBANGAN PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN TUNTANG

NO.	DESA	BANGUNAN									TOTAL		
		PERMANEN			SEMI PERMANEN			NON PERMANEN			Luas (Ha)	Bgn (bh)	kerapatan
		Luas (Ha)	Bgn (bh)	kerapatan	Luas (Ha)	Bgn (bh)	kerapatan	Luas (Ha)	Bgn (bh)	kerapatan			
1	Tuntang	19,25	117	6	36,25	650	18	14,50	80	5	70,00	847	12
2	Lopait	16,75	48	3	32,00	467	15	22,20	125	6	70,75	640	9
3	Kesongo	12,75	42	3	27,50	666	24	8,20	30	4	48,50	738	15
4	Delik	25,50	101	4	40,50	469	12	8,50	66	8	74,50	636	8
	Jumlah	74,25	308	4	136,25	2252	16	53,25	301	6	263,75	2861	11

Sumber : Monografi Desa tahun 1992

Keterangan : 1. Luas Wilayah terbangun adalah hasil pengukuran Planimeter

2. Kerapatan adalah jumlah bangunan persatuan luas wilayah terbangun dalam Ha.

2. Wilayah Yang belum Terbangun

Wilayah belum terbangun adalah wilayah yang diusahakan untuk pertanian. Penggunaan tanah pada wilayah ini khususnya untuk bagian barat jalan raya Bawen - Salatiga merupakan daerah persawahan yang sebagian besar dapat ditanami padi 2 kali dalam setahun dan terdapat persawahan yang hanya dapat ditanami 1 kali setahun karena lokasi tersebut tergenang pada musim hujan oleh limpahan air Rawapening.

Penggunaan tanah untuk bagian timur jalan raya Bawen - Salatiga merupakan tanah kering yang digunakan untuk pertanian tanaman tahunan dan perkebunan. Secara terperinci penggunaan tanah pada wilayah yang belum terbangun dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

TABEL 6
 PENGGUNAAN TANAH WILAYAH TERBANGUN DALAM WILAYAH PENGAMATAN BATAS WILAYAH KOTA.

NO.	DESA	LUAS DESA		PENGGUNAAN TANAH BELUM TERBANGUN										LAIN - LAIN (SUNGAI, RAWA, TELAGA, JALAN)	
				SAWAH		TEGALAN		KEBUN CAMPURAN		PERKEBUN AN		JUMLAH			
		(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%
1	Tuntang	350,25	100	45,00	12,85	51,00	14,56	25,50	7,28	27,00	7,71	148,56	42,40	131,75	37,62
2	Lopait	431,00	100	68,50	15,89	109,75	25,46	9,50	2,21	-	-	187,75	43,56	172,50	400,02
3	Kesongo	426,00	100	83,00	19,48	26,00	6,10	12,25	2,88	18,00	4,23	139,25	32,69	238,25	55,93
4	Delik	531,00	100	23,75	4,47	171,75	32,35	-	-	257,50	48,49	453,00	85,31	3,56	0,66
	Jumlah	1738,25	100	220,25	12,67	356,50	20,26	47,25	2,72	302,50	17,41	928,50	53,42	546,00	31,41

Sumber : Hasil Pengukuran Planimeter

D. JARINGAN JALAN DAN FASILITAS PELAYANAN UMUM

1. Jaringan Jalan

Sebagaimana kemukakan pada bagian depan bahwa pada wilayah pengamatan dilalui oleh jalan Negara yang menghubungkan Kota Ungaran dan Kota Salatiga juga jalan Kabupaten yang menghubungkan ke Kota Bringin dan ke Kota Grobogan.

Pada Wilayah pengamatan jaringan jalan antara lingkungan maupun jalan utama desa sebagian besar sudah diperkeras dengan batu dan hanya sebagian kecil yang masih berupa jalan tanah.

Secara terperinci kondisi dan status jalan masing-masing desa dalam wilayah pengamatan dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini

Tabel 7 : Panjang Jalan berdasarkan Status dan Kondisi di Tiap-tiap Desa dan Wilayah Pengamatan.

NO.	DESA	NEGARA		KAB		DESA		PANJANG JALAN (M)
		ASPAL (M)	ASPAL (M)	ASPAL (M)	BATU (M)	TANAH (M)		
1	Tuntang	1.700	1.100	2.640	5.200	3.540	14.180	
2	Lopait	1.160	-	-	7.520	4.160	12.940	
3	Kesongo	1.520	560	1.940	460	10.080	14.860	
4	Deik	-	1.500	2.300	6.860	9.660	20.340	
	Jumlah	4.380	3.160	6.880	20.180	27.440	62.026	

Sumber : Hasil Pengukuran Curvemeter

2. Fasilitas Pelayanan Umum

Seperti pada umumnya kota - kota lain, kota disamping berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi daerah sekitarnya, kota juga diharapkan sebagai pengembangan bagi daerah sekitarnya, dan juga diharapkan pula berperan dalam memberikan pelayanan bagi warga kota itu sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Demikian pula halnya untuk ibu kota Kecamatan Tuntang dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pada masyarakat telah dibangun beberapa macam fasilitas untuk pelayanan umum antara lain :

a. Fasilitas Perkantoran

Fasilitas Perkantoran di wilayah pengamatan selain terdapat di desa Tuntang antara lain Kantor Kecamatan, Kantor Polsek, Kantor Koramil, Kantor Depdikbud, KUA, Pos dan Giro, BKK, BRI, LVRI dan KUD. Untuk lebih jelasnya mengenai penyebaran fasilitas Perkantoran dapat dilihat pada Peta No. 1 Penentuan Wilayah Penelitian.

b. Fasilitas Pendidikan.

Fasilitas pendidikan yang ada di wilayah pengamatan yaitu mulai dari tingkat Kanak - kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Taman Kanak - kanak dan Sekolah Dasar berada tersebar cukup merata disemua wilayah pengamatan Sedangkan SLTP Negeri dan swasta yang berada di desa Kesongo. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah sekolah dan murid pada masing - masing Kelurahan/Desa dalam wilayah pengamatan dapat dilihat pada Tabel No. 8 di bawah ini dan penyebarannya fasilitas pendidikan dapat dilihat pada Peta No 1 Penetapan Wilayah penelitian.

TABEL 8
 JUMLAH SEKOLAH YANG ADA DALAM WILAYAH PENGAMATAN

NO.	DESA	TK			SD			MADRASAH			SLTP			SLTA		
		SEKOLAH bh	MURID or	GURU	SEKOLAH bh	MURID or	GURU	SEKOLA bh	MURID or	GURU	SEKOLA bh	MURID or	GURU	SEKOLA bh	MURID or	GURU
1	Tuntang	4	132	8	4	744	36	1	102	5	-	-	14	-	-	-
2	Lopait	4	118	8	2	437	19	1	148	7	-	-	-	-	-	-
3	Kesongo	3	120	5	4	800	42	1	118	10	1	160	16	1	50	12
4	Deik	2	88	4	3	610	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	13	458	25	13	2591	136	3	368	22	1	160	30	1	50	12

Sumber : Monografi Desa dalam Wilayah Pengamatan Tahun 1992

c. Fasilitas Perdagangan

Fasilitas Perdagangan yang terdapat di wilayah pengamatan belum memadai, karena hal ini hanya terdapat 4 buah pasar di Desa Tuntang dan Kesongo, sedangkan toko-toko yang besar belum ada, yang ada hanya kios-kios kecil.

d. Fasilitas Kesehatan

Dalam Rangka memenuhi kebutuhan kesehatan, dalam wilayah pengamatan telah tersedia beberapa macam Fasilitas Kesehatan yaitu : Puskesmas, Rumah Bersalin, Rumah Dinas Dokter, BKIA dan lain sebagainya. Disamping itu terlihat bahwa di wilayah pengamatan masih eekurangan tenaga medi maupun fasilitas kesehatan yang lain.

Secara terperinci mengenai jumlah fasilitas kesehatan, Tenaga medis, dan Paramedis dalam wilayah pengamatan dapat dilihat pada tabel 9

TABEL NO. 9 Jumlah Fasilitas Kesehatan, Tenaga Medis dan Para Medis di Wilayah Studi Penetapan Batas Wilayah Kota Kecamatan Tuntang.

NO.	DESA	RSU	R.S	PU	BKIA	POLI	BIDAN	DOKTER	APOTIK	DUKUN BAYI
		bh	Bersalin bh	KES MAS bh		KLINIK bh	PERA WAT org			
1.	Tuntang	-	-	1	1	-	1	1	1	1
2.	Lopait	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Kesongo	-	-	-	1	-	-	-	-	3
4.	Delik	-	-	-	-	-	2	-	-	6
Jumlah		-	-	1	2	-	3	1	1	11

Sumber : Monografi Desa dalam Wilayah Pengamatan.

e. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang ada di wilayah pengamatan terdiri dari Masjid, mushola dan gereja, sedangkan pura vihara atau fasilitas peribadatan yang lain belum tersedia. Perincian tempat ibadah yang ada pada wilayah pengamatan dapat dilihat pada tabel 10, sedangkan penyebarannya dapat dilihat pada tabel 10, sedangkan penyebarannya dapat dilihat pada penentuan wilayah Penelitian sebagai berikut :

TABEL NO. 10 : Jumlah Tempat Ibadah di Kota Tuntang 1992

NO.	DESA	MASJID	MUSHOLA	GEREJA	VIHARA	PURA	JUMLAH
		(buah)	(buah)	(buah)	(buah)	(buah)	(buah)
1.	Tuntang	6	12	1	-	-	19
2.	Lopait	4	10	1	-	-	15
3.	Kesongo	6	26	-	-	-	34
4.	Delik	3	8	3	-	-	14
Jumlah		12	58	5	-	-	62

Sumber : Data Monografi Desa Tahun 1992

Sedangkan untuk jumlah pemeluk masing-masing agama dalam wilayah pengamatan adalah sebagaimana Tabel 11 di bawah ini

TABEL NO. 11 : Jumlah pemeluk Agama di Kota Tuntang Tahun 1992

NO.	DESA	ISLAM	KATHOLIK	PROTESTAN	BUDHA	HINDU	JUMLAH
		(orang)	(orang)	(orang)	(orang)	(orang)	(orang)
1.	Tuntang	4.217	197	54	9	-	4.477
2.	Lopait	3.237	15	159	24	-	3.465
3.	Kesongo	5.409	8	24	-	-	5.441
4.	Delik	2.692	199	73	2	-	2.966
Jumlah		15.555	419	340	35	-	16349

Sumber : Data Monografi Desa Tahun 1992

f. Fasilitas Rekreasi dan Industri Wisata.

Kota Tuntang yang dilalui oleh jalur jalan utama dan menghubungkan kota Semarang - Ungaran - Salatiga pada akhir-akhir ini telah banyak tumbuh beberapa Rumah Makan yang dilengkapi pula Kolam Renang dan tempat bermain untuk anak-anak. Hal ini sangat mendukung dari segi pelayanan rekreasi wisata untuk kota-kota sekitarnya. Disamping itu Kota Tuntang yang terletak dekat dengan keberadaannya Rawa Pening maka daerah ini potensial untuk dikembangkan sebagai kota pariwisata.

3. Fasilitas Kota

Jaringan air minum pada daerah pengamatan juga sudah tersedia mulai tahun 1991/1992 yang mengambil sumber dari Desa Kesongo.

Drainase kota, topografi daerah pengamatan merupakan permukaan tanah yang berbukit dengan arah kemiringan dari bagian timur ke barat atau ke arah Rawa Pening, disamping itu terdapat sebuah sungai yang cukup besar yaitu sungai Tuntang, sehingga pemasukan air hujan maupun air limbah di daerah ini cukup baik dan lancar.

Genangan air terdapat di daerah persawahan yang berada di sekitar Rawa Pening yaitu apabila terjadi peluapan air rawa pada musim - musim hujan.

E. STATUS TANAH

Status tanah dalam wilayah pengamatan meliputi :

1. Tanah Yasan yang belum bersertifikat dan sebagian kecil yang sudah ada sertifikat.
2. Tanah Hak Guna Usaha / HGU dan Hak Pakai yang ada pada perkebunan Tlogo dan Perkebunan PT. Sri Sarwo Adhi.

F. FAKTA KEPENDUDUKAN

1. Jumlah dan perkembangan penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
tabel 12 : Jumlah dan perkembangan penduduk di wilayah pengamatan.

NO.	DESA	1988	1989	1990	1991	1992	LAJU PERTUMBUHAN
1.	Tuntang	4.308	4.333	4.463	4.485	4.504	272
2.	Lopait	3.019	3.075	3.087	3.260	3.465	364
3.	Kesongo	4.989	4.989	5.037	5.221	5.441	429
4.	Delik	2.741	2.772	2.776	2.776	2.778	
	Jumlah	15.057	15.169	15.363	15.742	16.197	1.065

Sumber Data : Monografi Desa

Dari data tersebut di atas terlihat adanya perkembangan penduduk dari tahun ke tahun terlihat adanya jumlah maupun laju pertumbuhan penduduk :

- a. - Jumlah Penduduk Tahun 1988 : 15.057
- Jumlah Penduduk Tahun 1989 : 15.169
- Jumlah Penduduk Tahun 1990 : 15.363
- Jumlah Penduduk Tahun 1991 : 15.742
- Jumlah Penduduk Tahun 1992 : 16.197

- b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dari data perhitungan didapat laju pertumbuhan penduduk rata - rata 1,85 %

2. Kepadatan Penduduk

Tabel 13: Kepadatan Kotor Penduduk di tiap desa dalam wilayah pengamatan pada tahun 1992

NO.	DESA	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH PENDUDUK JIWA	KEPADATAN KOTOR PENDUDUK JIWA / HA
1.	Tuntang	350,25	4.504	13
2.	Lopait	431,00	3.465	8
3.	Kesongo	426,00	5.441	13
4.	Delik	531,00	2.787	5
Jumlah		1738,25	16.197	39

Sumber : Perhitungan dari data monografi desa tahun 1992

NO.	DESA	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH PENDUDUK JIWA	KEPADATAN KOTOR PENDUDUK JIWA / HA
1.	Tuntang	70,00	4.504	64
2.	Lopait	70,75	3.465	49
3.	Kesongo	48,50	5.441	112
4.	Delik	74,50	2.787	37
Jumlah		263,75	16.197	61

Sumber : Perhitungan dari data Monografi desa tahun 1992

3. Komposisi Umur Penduduk

Dari data tabel 15 selanjutnya dapat diketahui perbandingan usia produktif dengan usia non produktif adalah mengambil data usia penduduk 15 - 59 tahun dan jumlah penduduk non produktif adalah usia penduduk 0 - 14 tahun dan jumlah penduduk usia di atas 60 tahun

TABEL 15 :
 JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DALAM WILAYAH PENGAMATAN PENETAPAN BATAS WILAYAH
 KOTA KECAMATAN TUNTANG TAHUN 1992

NO.	DESA	JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR																JUMLAH	
		0 - 14		15 - 19		20 - 24		25 - 29		30 - 39		40 - 49		50 - 59		60 Keatas			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Tuntang	751	726	248	214	291	223	227	246	269	253	131	185	202	184	191	240	2.233	2.271
2	Lopait	754	631	148	149	124	150	127	127	233	268	108	146	135	142	159	123	1.737	1.728
3	Kesongo	1011	834	243	262	251	361	241	241	298	286	282	297	241	262	154	145	2.721	2.720
4	Delik	411	430	156	166	140	178	145	145	131	171	109	167	102	158	69	70	1.260	1.518
	Jumlah	2927	2621	795	791	806	912	740	740	931	978	630	895	680	746	573	578	7.960	8.237

Sumber : Monografi Desa Tahun 1991

Dari data diatas selanjutnya dapat ketahui perbandingan usia produktif dengan usia non produktif, dimana usia produktif adalah mengambil usia penduduk 15 - 59 tahun dan jumlah penduduk non produktif adalah usia penduduk 0 - 14 tahun dan jumlah penduduk usai di atas 60 tahun .

Uraian data tersebut dapat dilihat pada tabel 16.

TABEL 16 : PProsentase Jumlah Penduduk Produktif dan non Produktif di Kota Tuntang Tahun 1992

NO.	DESA	JUMLAH PENDUDUK JAWA	PRODUKTI (15 - 59 Th)		NON PRODUKTIF (0 - 14 > 60)	
			JAWA	%	JAWA	%
1.	Tuntang	4.504	1.926	64,44	1.878	41,70
2.	Lepait	3.465	1.848	60,60	1.617	46,67
3.	Kesongo	5.441	3.297	53,33	2.144	39,40
4.	Delik	2.787	1.796	58,30	991	35,56
Jumlah		16.197	9.567	59,07	6.630	40,93

Sumber : Perhitungan data dari Tabel 12

Dan data diatas maka desa yang paling tinggi mengenai jumlah penduduk yang produktif yaitu desa Tuntang = 64,44 % sedangkan yang paling kecil prosentase penduduk produktifnya adalah desa Kesongo yaitu 53,33 %

4. Mata Pencapaian wilayah pengamatan menunjukkan bahwa mata pencapaian penduduk pada sektor pertanian 44,8% dan non pertanian 55,2%. Untuk lebih jelasnya ta:perinci dalam tabel 17 di bawah ini.

TABEL 17

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK TAHUN 1992 PADA WILAYAH PENGAMATAN PENETAPAN BATAS WILAYAH
KOTA TUNTANG TAHUN 1992

NO.	DESA	MATA PENCAHARIAN											JUMLAH (Orang)	
		PERTANIAN			NON PERTANIAN									
		PETANI PEMILIK	BURUH TANI	NELAYAN	PENGUSAHA	BURUH INDUSTRI	BURUH BANGUNAN	PERDAG	ANGKUTAN	PN/ ABRI	PENSIUNAN	LAIN - LAIN		
1	Tuntang	287	258	43	11	158	178	59	70	127/16	26	27	1.270	
2	Lopait	403	1.380	70	4	35	35	35	31	17	34	534	2.582	
3	Kesongo	748	482	503	-	169	182	182	-	55	20	1.426	4.093	
4	Delik	443	216	-	254	190	174	174	115	324	84	383	2.326	
	Jumlah	1.881	2.106	616	269	659	764	447	216	539	164	2370	10.271	
	Prosen	44,8 %			55,2 %									100 %

BAB IV

ANALISA DATA

A. DASAR ANALISA

1. Pengertian Analisa

Proses Analisa adalah suatu proses pengenalan terhadap aspek - aspek :

- Kondisi perkotaan secara umum
- Kecenderungan pertumbuhan dan perkembangan kota.
- Pendorong ataupun pembatas bagi pertumbuhan dan perkembangan kota.

Untuk dapat menyusun suatu rencana sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka kelurahan dari proses analisa harus memiliki akurasi dan keterpaduan aspek - aspek yang dianalisa. Selain itu pemakaian metode, teknik dan standart perencanaan di dalam proses analisa perlu pula disesuaikan dengan karakteristik wilayah perencanaan.

2. Maksud dan tujuan

Sesuai dengan pengertian tersebut di atas, maka maksud dan tujuan analisa adalah :

- Mengidentifikasi fungsi dan peranan kota untuk mengetahui kedudukan dan kemampuan pelayanan lokal maupun regional.
- Mengidentifikasi karakteristik / perwatakan perkembangan yang berkaitan dengan aspek - aspek kependudukan, fisik, sosial dan perkotaan.
- Mengidentifikasi faktor - faktor pertumbuhan dan perkembangan kota yang meliputi faktor - faktor pendorong serta faktor - faktor pembatas bagi pertumbuhan dan perkembangan kota. Faktor - faktor pembatas :
 - Fisik : Lereng terjal, daerah banjir, tanah subur
 - Hukum : Cagar alam, Hutan Lindung
- Mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan kota berdasarkan fungsi dan peranannya, kondisi fisik sosial ekonomi dan perwatakan faktor - faktor perkembangan yang ada.

3. Metode Analisa

- Untuk kajian kebijaksanaan dipakai teknik pengumpulan data sekunder yang meliputi laporan - laporan, peraturan - peraturan yang ada dan data - data. Selain itu dilakukan wawancara dengan Pejabat terkait sesuai dengan kebutuhan.
- Untuk study sistem kegiatan digunakan teknik pengumpulan data sekunder dan pengamatan tidak langsung.
- Teknik pengumpulan data primer melalui pengamatan langsung dalam survey tata guna tanah, kondisi bangunan dan sirkulasi pergerakan. Analisa yang digunakan adalah Analisa Tata Guna Tanah Existing dan kecenderungan perkembangannya.
- Selain itu dalam pelaksanaan analisa, metode yang dipakai juga meliputi Overlay, Tabulasi, Konjulasi dan Korelasi.

B. ANALISIS KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk keempat Desa di wilayah pengamatan tahun 1992 sekitar 16.197 jiwa yang mendiami wilayah seluas 1738,25 dan penyebarannya tidak merata.

1. Proyeksi penduduk sampai 20 ahun mendatang

Perhitungan perkiraan atau proyeksi penduduk dengan menggunakan rumus :

$$P_{20} = P_0(1+r)$$

P_{20} = Perkiraan jumlah penduduk tahun ke 20 (2012)

P_0 = Jumlah penduduk tahun awal (tahun 1992)

r = Rata - rata pertumbuhan penduduk pertahun

Jumlah penduduk seama 5 tahun (1988 - 1992) di wilayah pengamatan adlah :

Tahun 1988 = 15.057 jiwa Tahun 1989 = 15.169 jiwa

Tahun 1990 = 15.363 jiwa

Tahun 1991 = 15.742 jiwa

Tahun 1992 = 16.197 jiwa

Dari angka - angka tersebut diatas dapat dihitung rata - rata laju pertumbuhan penduduk pertahun (r) adalah : 1,85 % Untuk menghitung jumlah penduduk 20 tahun mendatang dengan rumus tersebut, dipakai =

- Jumlah penduduk tahun 1992 = 16.197 Jiwa

- Rata - rata laju pertumbuhan penduduk (r) = 1,85 (0,0185)

Maka $P_{20212} = P_{1992} (1 + 0,0185)^{20}$

$$= 16.197 (1,0185)^{20}$$

$$= 16.197 \times 1,4428$$

$$= 23.369 \text{ Jiwa}$$

2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Kotor penduduk di wilayah pengamatan pada akhir tahun 192 sebesar 9 jiwa / Ha. Sedangkan kepadatan bersih sebesar 61 jiwa / Ha. Di dalam wilayah pengamatan tingkat kepadatan penduduk per desa bervariasi seperti di Desa Tuntang 13 Jiwa / Ha. Kemudian Desa Kesongo 13 Jiwa / Ha. desa Lopait 8 Jiwa / Ha. dan Desa Delik 13 Jiwa / Ha.

Keadaan ini menunjukkan bahwa pola penyebaran penduduk di wilayah pengamatan tidak merata dengan perbedaan yang tidak begitu besar.

3. Komposisi Umur Penduduk

Ditinjau dari struktur umur penduduk di wilayah pengamatan kelompok umur 0 - 14 tahun dan kelompok usia produktif merupakan kelompok penduduk terbesar. Besarnya penduduk usia 0 - 14 tahun dan usia produktif serta usia sekolah, maka usaha pengembangan menjadi sangat penting.

Salah satu usahanya adalah penyediaan fasilitas yang diperlukan bagi pengembangan potensi sumber daya manusia itu.

4. Mata Pencarian Penduduk

Penduduk yang bermata pencarian pertanian (44,8%) dan non pertanian (55,2 %). Potensi di sektor pertanian justru lebih rendah yang terdiri dari Petani Pemilik 1881, buruh tani 2106 dan nelayan 616. Keadaan tersebut di atas menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja lebih banyak di sektor non pertanian. Hal ini berarti perkembangan kota

Tuntang akan semakin meninggalkan sektor non pertanian.

Oleh karena itu pengembangan di sektor industri dan perdagangan serta peningkatan di bidang jasa, buruh bangunan merupakan pilihan penyediaan lapangan kerja yang sesuai bagi penduduk di wilayah pengamatan kota Kecamatan Tuntang. Kecenderungan Perkembangan dan usaha pengembangan tersebut juga berkaitan erat dengan kebutuhan ruang yang cenderung akan mendesak kepentingan - kepentingan di sektor non pertanian.

C. Analisa Kebutuhan Ruang Sampai Tahun 2012

Kepadatan penduduk Kota yang ideal digunakan sebagai dasar perhitungan, yaitu ditetapkan antara 60 - 80 jiwa / Ha sehingga :

- Kebutuhan Ruang Kota Kecamatan Tuntang dengan kepadatan penduduk 60 Jiwa / ha dan estimasi jumlah penduduk tahun 2012 sebesar 23.369 Jiwa adalah :

$$\frac{23.369}{60} = 389,48 \text{ Ha}$$

- Kebutuhan Ruang kota Kecamatan Tuntang dengan kepadatan penduduk 80 Jiwa / Ha dan estimasi jumlah penduduk tahun 2012 sebesar 23.369 Jiwa adalah :

$$\frac{23.369}{80} = 292,11 \text{ Ha}$$

Jadi Kebutuhan ruang 20 tahun yang akan (tahun 2012) adalah berkisar antara 292,11 Ha - 389,48 Ha dari kondisi tahun 1992.

Dengan memperhatikan dua alternatif perkiraan tersebut di atas, maka luas wilayah kota Tuntang yang meliputi 1194,25 cukup untuk memenuhi kebutuhan ruang sampai dengan 20 tahun mendatang.

2. Arah Perkembangan Fisik dan Ruang

a. Faktor Pembatas

1). Faktor Fisik

Berdasarkan pengamatan lapangan maupun dari Peta Topografi yang ada, kondisi wilayah pengamatan dapat dikembangkan dengan memperhatikan faktor pembatas alam yang ada.

Beberapa faktor fisik yang sangat mempengaruhi pengembangan wilayah kota yaitu :

- a). Topografi wilayah, Pola Aliran Sungai, daya dukung tanah dimana dalam menentukan wilayah pengembangan kota harus menghindari daerah yang kemiringan tanahnya terjal (lebih dari 40 %) dan menghindari daerah banjir / rawa.
- b). Pola penggunaan tanah yang ada di wilayah pengamatan banyak terdapat sawah dengan produktivitas panen padi dua kali tiap tahunnya merupakan faktor pembatas yang perlu dipertimbangan. Selain itu adanya areal perkebunan yang luas merupakan faktor pembatas pula.
- c). Kondisi wilayah pengamatan bagian Barat jalan Bawen - Salatiga perlu pertimbangan yang masak, sehingga dapat mempertahankan keindahan pemandangan ke arah Rawa Pening dengan latar belakang Gunung Telomoyo dan perbukitan sekitarnya.

d). Faktor Perair yaitu yang dengan adanya fasilitas sosial maupun ekonomi yang tersedia pada kota tersebut, dalam hal ini untuk Ibukota Kecamatan Tuntang kecenderungan perkembangan kotanya sangat dipengaruhi oleh jalur utama yang melintasinya, yaitu Jalan negara Semarang - Surakarta. Kecenderungan lebih besar kearah Selatan yaitu tertarik kearah Kota Salatiga. Perkembangan ke arah Timur dan Barat sangat kecil dikarenakan faktor pembatas alam yang ada yaitu ke arah Barat relatif dekat dengan keberadaan Rawapening yaitu kelerengan yang cukup tajam (lebih dari 40%). Sedangkan perkembangan ke arah utara juga terbatas karena keberadaan sungai Tuntang yang merupakan batas fisik kota sebelah utara, desa miring itu seberang sungai penggunaan tanahnya adalah perkebunan. Untuk memperjelas arah dan pola perkembangan kota Tuntang dapat dilihat pada peta nomor 5 yaitu Peta Arah Perkembangan Fisik Kota.

2). Faktor Hukum

Faktor pembatas dari aspek hukum yaitu tanah - tanah yang menurut hukum sulit untuk dikembangkan sebagai daerah perkotaan antara lain Hak Guna Usaha dan Hak Pakai yang melekat pada perkebunan - perkebunan yang ada di wilayah pengamatan.

b. Faktor Penunjang

- 1). Aksesibilitas (Pola Jaringan Jalan dan Transportasi) Ditinjau dari aksesibilitas, wilayah pengamatan kota kecamatan Tuntang dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :
 - Pertama : Pengaruh pengembangan yang kuat dari pusat kota Kecamatan Tuntang terhadap transportasi skala makro yang berkaitan dengan hubungan transportasi skala regional.
 - Kedua : Transportasi skala makro atau lokal yaitu dalam kaitannya dengan transportasi antar desa di dalam wilayah pengamatan.
 - Ketiga : Adanya fasilitas sosial maupun ekonomi yang tersedia di dalam wilayah pengamatan.
 - Keempat : Adanya jalur jalan utama arah melintasi jalan negara Semarang - Surakarta, kecenderungan lebih besar ke arah Selatan yaitu tertarik ke arah kota Salatiga.
- 2). Fasilitas Pelayanan Umum
Fasilitas pelayanan umum yang meliputi sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan perkantoran penyebarannya belum merata serta memusat pada pusat kota Kecamatan Tuntang.
Penyebaran yang sudah merata adalah sarana pendidikan peribadatan. Hal ini ditinjau dari aspek pelayanan umum masih belum merupakan faktor pendukung untuk menentukan arah perkembangan kota.
- 3). Fasilitas Kota
Daya dukung fasilitas - fasilitas kota untuk menentukan arah perkembangan kota seperti :
 - Jaringan listrik
 - Jaringan Telepon
 - Jaringan Riool
 - Jaringan air minum dll.

dapat dikembangkan sehingga dapat mendukung keberadaan kota yang memenuhi persyaratan satu kota yang aman, tertib, lancar dan sehat.

Mengingat keadaan wilayah pengamatan saat ini ada beberapa fasilitas seperti :

- Jaringan listrik sudah menjangkau ke wilayah pengamatan kota, hanya beberapa dusun yang belum menggunakan fasilitas listrik yang ada.
- Jaringan riol tidak menjadi masalah yang serius dalam wilayah pengamatan kota Kecamatan Tuntang mengingat wilayah pengamatan masih bersifat pedesaan. Namun demikian untuk memenuhi adanya fasilitas jaringan riol dapat dikembangkan dengan mengarahkan saluran pembuangan menuju ke sungai yang berada di wilayah pengamatan.
- Jaringan telepon yang ada adalah lintas Kecamatan Tuntang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

4). Status Tanah

Status tanah di wilayah pengamatan kota Kecamatan Tuntang dapat dilihat pada peta status tanah skala 1 : 20.000.

Karena keadaan status tanah di wilayah pengamatan sebagian besar tanah yasan yang belum bersertifikat dan adanya tanah-tanah dengan status Hak Pakai, dan dan Hak Guna Usaha untuk perkebunan, maka arah pengembangan kota Kecamatan Tuntang sedikit banyak dipengaruhi oleh keadaan status tanah di wilayah tersebut.

3. Wilayah Pengembangan

Berdasarkan analisis kebutuhan ruang sampai tahun 2012 arah perkembangan fisik dan ruang serta hasil perhitungan pesumeter pada peta maka wilayah yang layak untuk ditetapkan sebagai ibukota kecamatan tuntang adalah :

- a. Wilayah yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2012 adalah seluas 311,69 Ha., yang meliputi 2 Desa, yaitu :
 - Desa Tuntang seluas + 194,10 Ha
 - Desa Lopait seluas + 117,59 Ha
- b. Wilayah yang dicadangkan sebagai pengembangan adalah seluas + 101,55 Ha, yang meliputi :
 - Desa Lopait seluas + 46,29 Ha
 - Desa Kesongo seluas + 55,26 Ha
- c. Dengan demikian wilayah yang direkomendasikan sebagai wilayah kota Tuntang adalah seluas 390,39 Ha yang meliputi :
 - Desa Tuntang Seluas + 194,10 Ha
 - Desa Lopait Seluas + 141,03 Ha.
 - Desa Kesongo seluas + 55,26 Ha.

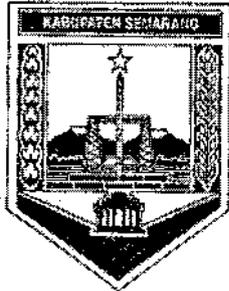
Untuk jelasnya dapat dilihat pada peta No. 8

BAB V

KESIMPULAN

Dengan memperhatikan keadaan umum wilayah pengamatan, baik yang menyangkut aspek fisik, pola penggunaan tanah, prasarana fasilitas umum, kependudukan, sosial ekonomi serta hasil analisa, dapat disimpulkan penetapan pembatas Wilayah Kota Tuntang adalah sebagai berikut :

1. Wilayah administrasi dan fisik kota Tuntang meliputi sebagian dari Desa Tuntang, Lopait dan Kesongo.
2. Luas wilayah Desa Tuntang meliputi 390,3846 Ha, yang terdiri dari sebagai Desa Tuntang seluas 194.1026 Ha, sebagian Desa Lopait seluas 141.0256 Ha. sebagian Desa Kesongo seluas 55.2564 Ha.
3. Batas - Batas wilayah Kota Tuntang adalah :
 - a. Sebelah Utara : Sungai Tuntang, Perkebunan Tlogo dan Jalan Kabupaten (Tuntang Bringin)
 - b. Sebelah Timur : Perkebunan Tlogo, Jalan Dusun Lopait, Dusun Jeblosan, Perkebunan Pt. Sri Sarwo Adhi dan Dusun Ngroto
 - c. Sebelah Selatan : Jalan Dusun Ngroto, Dusun Ngreco dan Kesongo Lor.
 - d. Sebelah Barat : Rowopening.
4. Agar tujuan penetapan batas wilayah kota dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan maka perlu kecapatan tindakan lanjut antara lain :
 - a. Penetapan hasil penelitian batas wilayah kota dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga memenuhi kekuatan hukum yang kuat dan mengikat.
 - b. Pemasangan . pembuatan logo bata skota sehingga secara fisik dapat diketahui dengan jelas dan mudah batas - batas wilayah kota Tuntang.



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

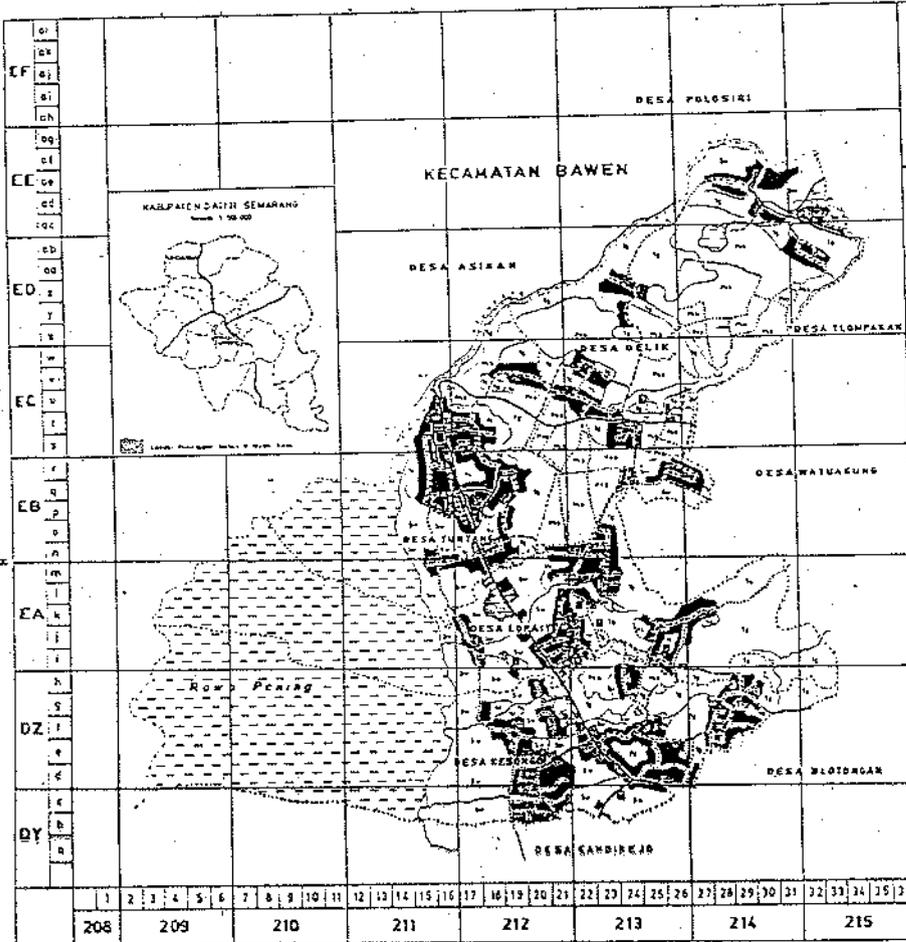
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KECAMATAN TUNTANG

LAMPIRAN PETA - PETA

1. PENENTUAN WILAYAH PENELITIAN
2. POLA PENGGUNAAN TANAH
3. KONDISI WILAYAH PENELITIAN
4. WILAYAH TERBANGUN
5. ARAH PENGEMBANGAN FISIK KOTA
6. KEBUTUHAN RUANG
7. WILAYAH PENGEMBANGAN
8. WILAYAH KOTA
9. ADMINISTRASI WILAYAH KOTA

TEAM TEKNIS PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG



**PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

SIRIHATAMA SATTA PRAJA

**PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KECAMATAN TUNTANG**

PETA No. 2

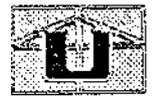
POLA PENGGUNAAN TANAH

Sekala 1 : 20000
-02 0 02 04 04 04 8 m

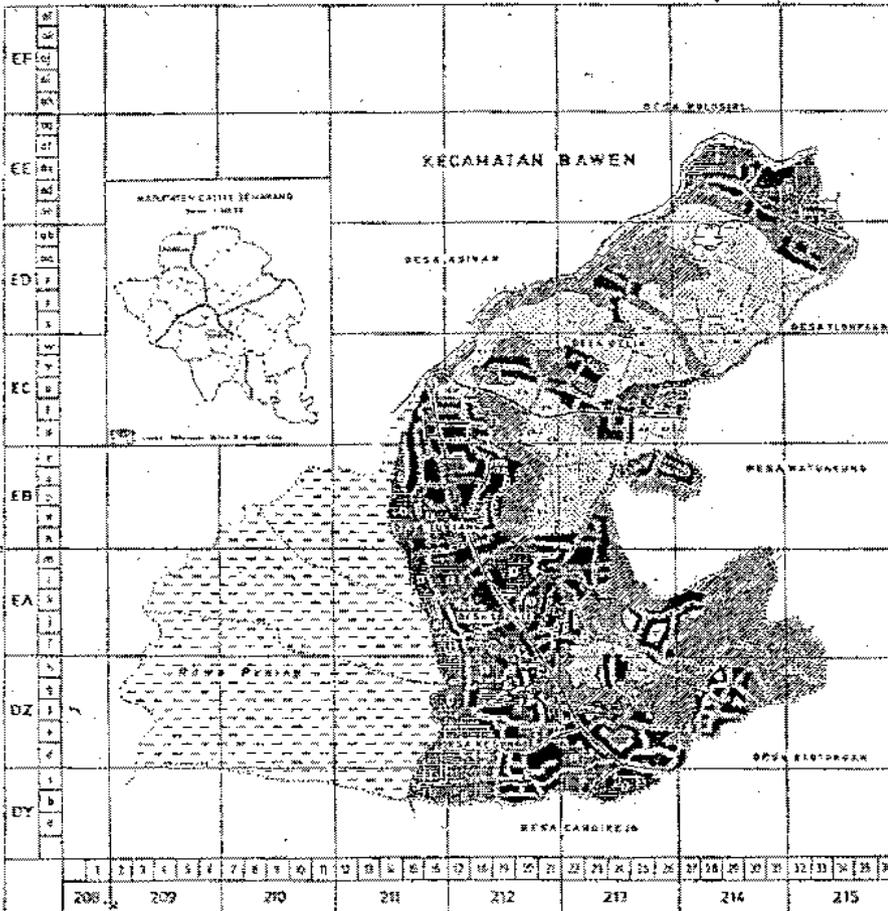
KETERANGAN

- | | |
|--|-----------------|
| PERUMAHAN | Batas Kecamatan |
| Kuburan | Batas Desa |
| Lapangan Olah Raga | Jalan Aspal |
| Lapangan | Jalan Batu |
| TANAH UNTUK JASA
(Kantor Pemerintah, Sekolah, Asosiasi dan Tempat Ibadah) | Jalan Tanah |
| TANAH PERUSAHAAN
(Pasar, Persewaan dan Terminal) | Sungai |
| TANAH KOSONG / PENGGUNAAN NON-URBAN | Saluran Air |
| Sw. Sawah | Tegalan |
| Re. Adun Campur | |
| Pda Perumahan | |
| TANAH INDUSTRI
Bengkel | |

**TEAM TEKNIS PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**



REKAMATA GABUNG W. 1980



**PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

BERHITUNG JAMANE SATEP DRAJA

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA

KECAMATAN TUNTANG

PETA No. 3

KONDISI WILAYAH PENELITIAN

Skala 1 : 20.000
S. 2. 22. 95. 2. 2. A

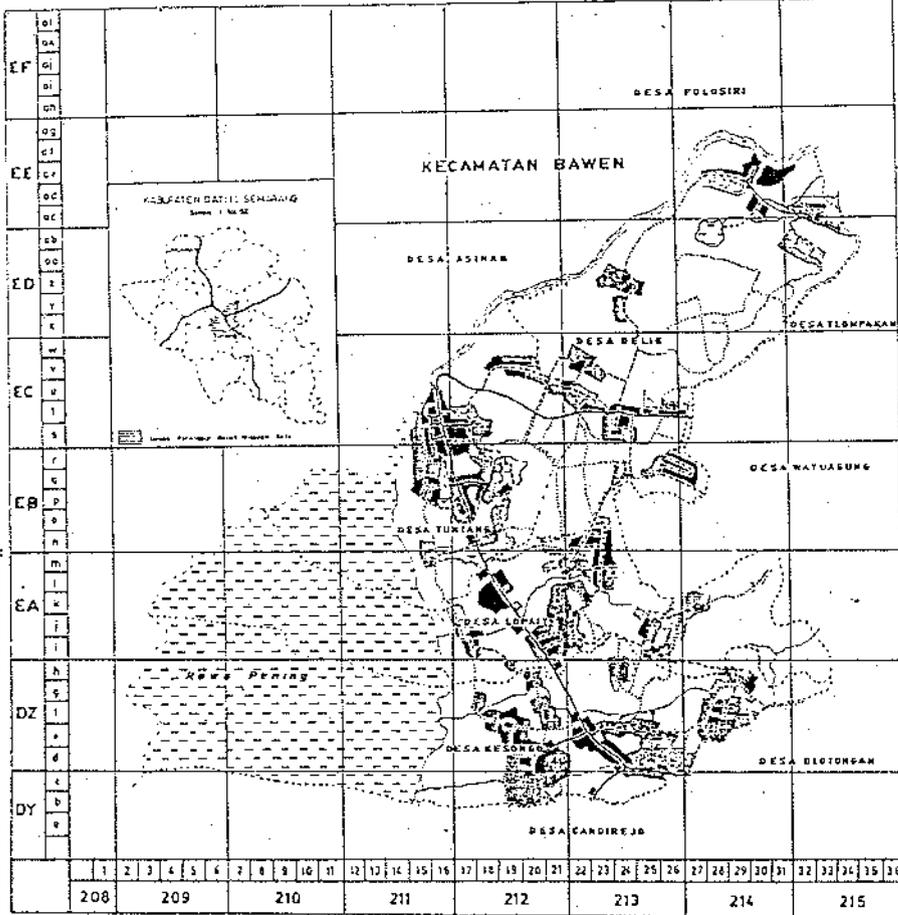
KETERANGAN

- | | | | |
|--|--|--|--------------------|
| | Daerah yang diteliti | | Garis Kecamatan |
| | 1. Jalan 1/2 Power pada perantara
2. Jalan 2/2 Power pada perantara | | Batas Desa |
| | Perumahan
Ct. (Gedung)
Kt. (Kaki)
Rt. (Napi) | | Jalan Aspal |
| | Kebun / Kompleks | | Jalan Batu / Beton |
| | Ladang | | Jalan Tanah |
| | R. C. M. C. (Sungai) | | G. S. (Kereta Api) |

TEAM TEKNIK PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG





**PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

CAHAYATAMA SATTA PRAJA

**PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KECAMATAN TUNTANG**

PETA No. 4

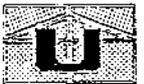
WILAYAH TERBANGUN

Sekala 1 : 20000
-02 0 02 04 06 08 K.m

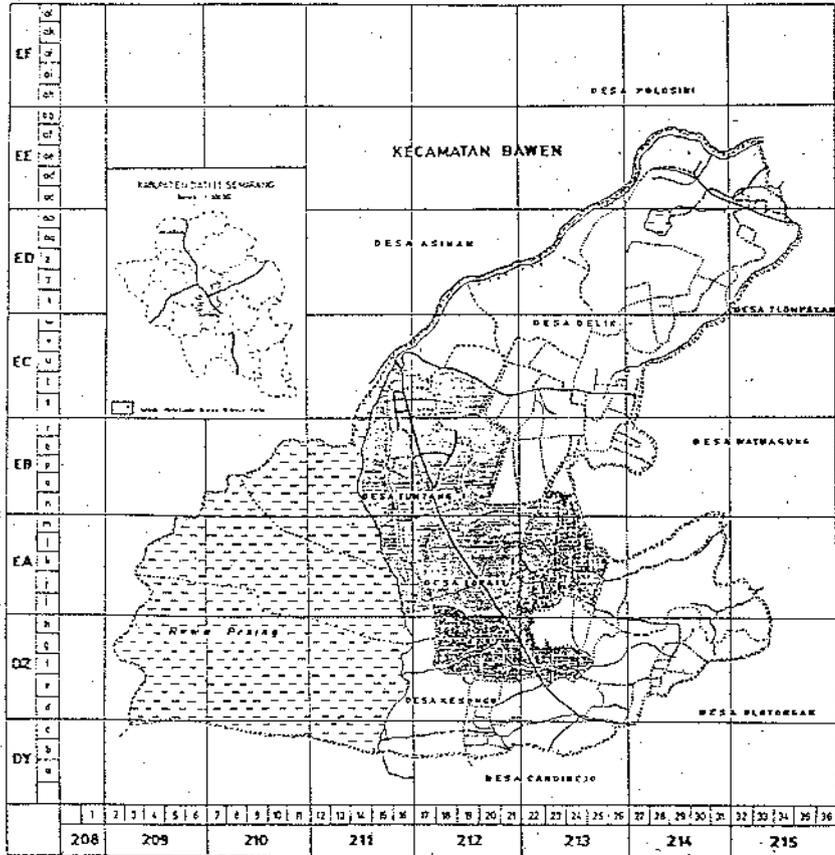
KETERANGAN

- | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------------------|
| | Bangunan Permanen | | Jalan Aspal |
| | Bangunan Semi Permanen | | Jalan Batu/Beton |
| | Bangunan Non Permanen | | Jalan Tanah |
| | Batas Kecamatan | | a Sungai / Kali
b Saluran Air |
| | Batas Desa | | Rawa / Telaga |

TIM TEKNIS PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG



DAFTAR PUSTAKA



**PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

DARHOTJAN, LATYA PRAGA

**PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KECAMATAN TUNTANG**

PETA No. 7

WILAYAH PENGEMBANGAN

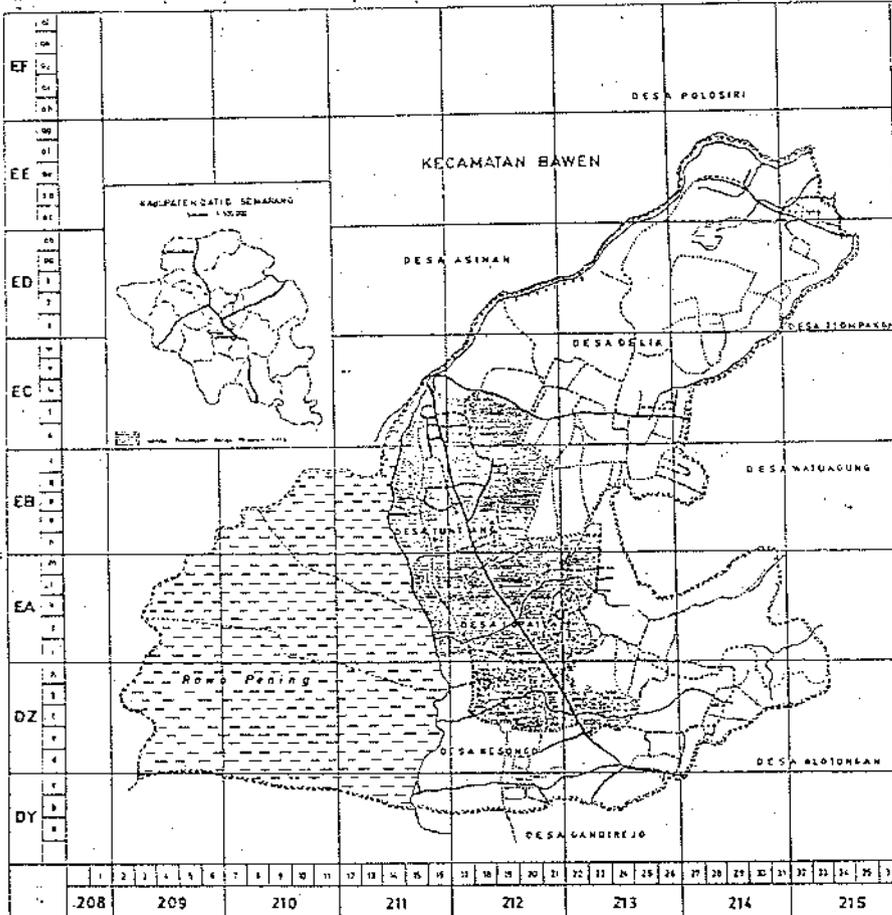
Skala 1 : 20.000
-02 0 02 01 01 04 KM

KETERANGAN

- Batas Wilayah Persebaran
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Wilayah yang dibutuhkan
- Wilayah Pengembangan
- Jalan Aspal
- Jalan Batu / Beton
- Jalan Tanah
- a. Sungai / Kali
- b. Saluran Air
- Kawa / Telaga

**TEAM TEKNIS PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**





**PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

BAHAGITAMA SATYA PRAMA

**PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KECAMATAN TUNTANG**

PETA No. 8

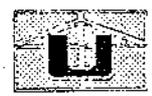
WILAYAH KOTA

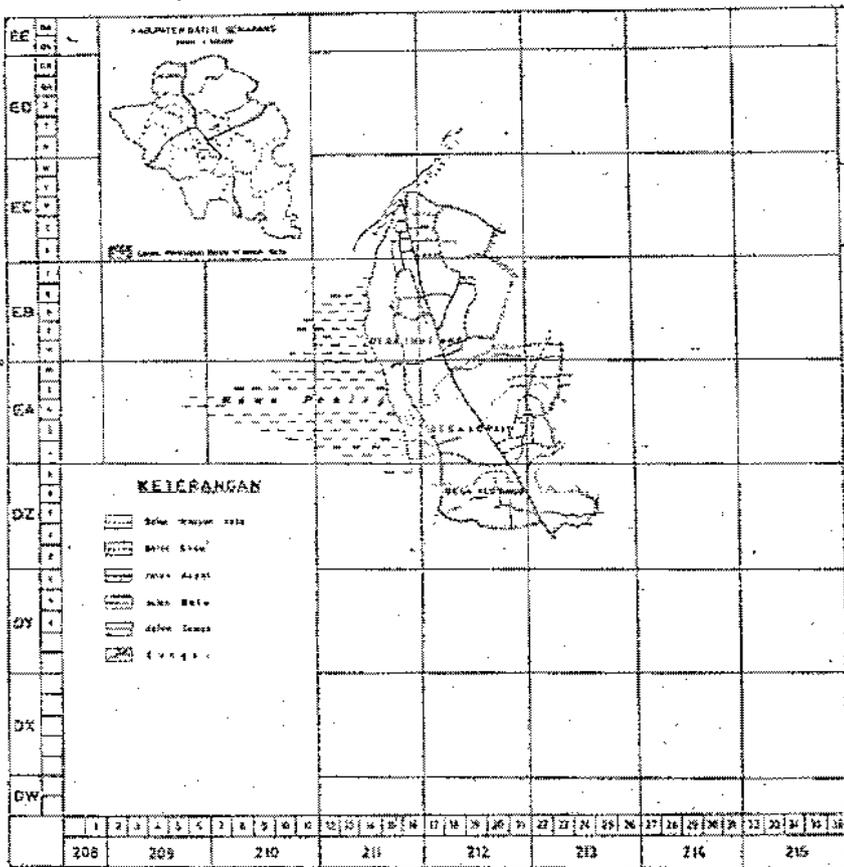
Skala 1 : 20.000
0 5 10 20 40 60 80 Km

KEJERANGAN

- Batas Wilayah Perumahan
- Batas Kota
- Wilayah Pengembangan (Wilayah Kota)
- Jalan Aspal
- Jalan Batu
- Jalan Tanah
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Sungai
- Saluran Air

TEAM TEKNIS PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG





**PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

DAPUJUTAMA BATA PEJAJI

**PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KECAMATAN TUNTANG**

FETA No. 9

ADMINISTRASI WILAYAH KOTA

Sekala 1 : 20.000
No. 9 92 01 36 01 00
KABUPATEN SEMARANG

DITETAPKAN DI UNGARAN

KELUA
DEWAN PERMUKAMATAN KECAMATAN
KABUPATEN BATA II SEMARANG

KUPATI
KEMULA DATARAH TINGKAT II
SEMARANG

SECRETARIO

SECRETARIO

TEAM TEKNIS PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

